

Efektivitas Manajerial Kepala Sekolah dan Peran Audit Internal dalam Mencegah *Fraud* Pelaporan Keuangan Dana Bos Melalui Arkas

Wahyu Wismawati¹, Yety Anggraini², Dwindi Agustintia³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, STIE Wijaya Mulya Surakarta

¹Email : wahyuwismawati2@gmail.com

²Email : yetyanggraini@gmail.com

³Email : dwindaaugustintia05@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas manajerial kepala sekolah dan peran audit internal dalam mencegah *fraud* pelaporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Efektivitas manajerial kepala sekolah menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel. Selain itu, audit internal berperan sebagai mekanisme *controlling* (pengawasan) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah praktik kecurangan. Metode Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pengelola dana BOS di SMK Muhammadiyah 4 Sragen, meliputi : Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator ARKAS. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi dan triangulasi untuk membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara terkait hubungan antara efektivitas manajerial kepala sekolah, fungsi audit internal, dan pencegahan *fraud* melalui optimalisasi ARKAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas manajerial kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Peran audit internal juga terbukti memperkuat pengendalian internal, sehingga mengurangi potensi *fraud*. ARKAS sebagai alat digital turut berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana BOS. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola pendidikan, terutama dalam mendorong peningkatan kompetensi kepala sekolah dari sisi kompetensi manajerial dan keuangan serta penguatan sistem audit internal. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: efektivitas manajerial, audit internal, *fraud*, pelaporan keuangan, dana BOS, ARKAS

The Managerial Effectiveness of School Principals and the Role of Internal Audits in Preventing Financial Reporting Fraud of BOS Funds through ARKAS

Abstract

This study aims to examine the managerial effectiveness of school principals and the role of internal audits in preventing financial reporting fraud in the management of School Operational Assistance (BOS) funds through the School Activity and Budget Planning Application (ARKAS). The managerial effectiveness of school principals is a crucial factor in ensuring transparent and accountable BOS fund management. Additionally, internal audits serve as a controlling mechanism to ensure compliance with regulations and prevent fraudulent practices. The research employs data collection techniques through interviews with BOS fund managers at SMK Muhammadiyah 4 Sragen, including the principal, treasurer, and ARKAS operator. The data were analyzed using reduction and triangulation techniques to compare observational findings with interview results regarding the relationship between the managerial effectiveness of school principals, the function of internal audits, and fraud prevention through the optimization of ARKAS. The results show that the managerial effectiveness of school principals significantly influences the quality of financial reporting. The role of internal audits also strengthens internal control, thereby reducing the potential for fraud. ARKAS, as a digital tool, contributes to enhancing the transparency and efficiency of BOS fund management. This study provides practical implications for education administrators, particularly in encouraging improvements in school principals managerial and financial competencies and strengthening the

internal audit system. As a result, BOS fund management can be conducted more effectively, efficiently, transparently, and accountably.

Keywords: *managerial effectiveness, internal audit, fraud, financial reporting, BOS funds, ARKAS*

PENDAHULUAN

Pada sebagian besar tingkat operasional, pemimpin sekolah adalah koordinator garis depan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah diangkat sebagai jabatan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya bersama untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat sekolah (Nurtanio, 2009). Kompetensi pemimpin sekolah pada pendidikan menengah masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Pimpinan sekolah memimpin penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, dan dengan menerapkan keterampilan manajemen sekolah berupa kemampuan untuk mengatur dan memantau kegiatan dan berkolaborasi dengan instansi lain untuk meningkatkan mutu, meningkatkan mutu pendidikan. upaya peningkatan kualitas serta jumlah guru dan tenaga pendidik (Hidayat & Novianti, 2005).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut prinsip pemisahan tugas antara fungsi wakil yang berwenang, donatur dan bendahara. Otorisator merupakan pejabat dengan wewenang untuk mengambil tindakan yang mengarah pada persetujuan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat dengan kekuasaan untuk mengelola tes dan pembayaran pesanan untuk tindakan yang diambil di bawah izin yang ditetapkan. Bendahara adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk menerima, menyimpan, dan membayar uang, serta mempunyai tugas untuk mempertanggungjawabkan. Kepala Sekolah, sebagai pengelola, berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Pada saat yang sama, kepala sekolah berkewajiban untuk menyiapkan dan menyetujui anggaran. Sehingga ketika para pelaksana pengelola laporan keuangan dapat berjalan dengan baik efektif dan efisien akan menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah instansi pendidikan dalam pengelolaan keuangan ketika ada pengawasan dan tinjauan dari tim audit internal.

Audit internal harus terus meninjau atau menindaklanjuti untuk memastikan bahwa temuan audit yang dilaporkan ditangani dengan tepat dan masalah yang sama tidak terulang. Audit internal perlu memastikan bahwa tindakan korektif diambil untuk berbagai temuan yang dilaporkan. Dalam hal ini, administrator bertanggung jawab untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam menanggapi temuan audit yang dilaporkan agar tidak terjadi tindakan kecurangan (*Fraud*). Di sisi lain, pengendalian internal bertanggung jawab untuk menilai tindakan yang diperlukan oleh manajemen sehingga berbagai masalah yang dilaporkan sebagai hasil audit dapat diselesaikan dan ditangani secara tepat waktu. Dalam menentukan ruang lingkup tindak lanjut dalam pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Pusat melalui Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS), Audit Internal harus mempertimbangkan berbagai langkah dari tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak lain dalam organisasi.

Program BOS pada dasarnya bertindak sebagai lembaga pelaksana yang tidak memihak untuk membiayai biaya operasional satuan pendidikan dasar yang cukup besar. Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut. Pendidikan di Indonesia berangsur-angsur membaik dan membaik berkat program dana BOS pemerintah. Pendanaan BOS yang diberikan ke sekolah membantu sekolah memenuhi berbagai kebutuhan dan operasional sekolah dan memastikan bahwa program pendidikan serta kegiatan pembelajaran sangat berhasil. Tujuan umum dari BOS Reguler adalah untuk membantu mendanai biaya operasional dan material sekolah, mengurangi biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah yang diselenggarakan masyarakat, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Salah satu cara untuk merealisasikan pendanaan BOS sesuai petunjuk teknis yang ada dan harapan pemerintah tidak mudah untuk ditipu. Dengan kata lain, bagaimana penerapan teknologi sistem informasi akuntansi di sekolah dengan baik, termasuk ARKAS, berlaku untuk perguruan tinggi swasta. Akuntansi adalah koordinasi yang erat dari berbagai instrumen, termasuk berbagai bentuk,

catatan, komputer dan perangkat, serta alat komunikasi, pelaksana dan laporan yang dirancang untuk mengubah data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan oleh manajemen (Nugroho et al., 2011).

Otoritas sekolah negeri wajib memperhatikan informasi dalam laporan pengelolaan keuangan BOS untuk keperluan perencanaan, administrasi, dan pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat dalam Laporan Pengelolaan Dana BOS hendaknya memuat beberapa informasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Salah satu bendahara BOS Reguler SMK Swasta kabupaten Sragen pada saat mengikuti sosialisasi terkait dengan pelaporan dana BOS SMK menyebutkan ada beberapa paparan yang disampaikan oleh pembicara, bahwa meskipun sekolah swasta tergolong lebih rentan, namun bukan berarti pengelolaan dana BOS di sekolah negeri sudah sempurna. Masalah pengelolaan dana BOS di sekolah umum masih terus meluas. Selain karena niat korupsi, penyalahgunaan dana BOS juga bisa terjadi karena ketidaktahuan sekolah tentang pengelolaan dana BOS yang baik dan benar. Sosialisasi telah dilakukan berkali-kali, tetapi pada kenyataannya masih ditemukan sekolah yang laporan pengelolaan dana BOS nya masih keliru sehingga menjadi temuan auditor. Apalagi untuk saat ini penggunaan ARKAS di SMK Swasta kabupaten Sragen baru diterapkan mulai tahun 2022, sehingga kemampuan dalam memahami pelaporan melalui aplikasi ini masih sangat minim.

Sebagai akibat dari permasalahan ini, maka pentingnya penelitian ini dalam dunia pendidikan, guna menemukan metode atau penerapan yang efektif dalam pengelolaan dana BOS Reguler SMK Swasta, peneliti tertarik dan mengambil judul “Efektivitas Manajerial Kepala Sekolah dan Peran Audit Internal dalam Mencegah *Fraud* Pelaporan Keuangan Dana Bos Melalui Arkas”.

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah kepala sekolah sudah melakukan manajemen yang baik pada SMK Swasta?
2. Bagaimana meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dana BOS Reguler pada SMK Swasta?
3. Apakah pelaksanaan audit internal sudah efektif pada SMK Swasta?
4. Bagaimana peran audit internal yang efektif dalam mencegah kecurangan terhadap laporan keuangan pada SMK Swasta?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan antara prinsipal dan agen dapat digambarkan sebagai suatu transaksi atau interaksi sosial dimana salah satu aktor yaitu agen bertugas untuk memuaskan kepentingan aktor lainnya yaitu prinsipal. Karakteristik hubungan keagenan muncul dari tiga asumsi utama model prinsipal-agen: Asumsi: Asumsi tentang perilaku pelaku, kepentingan pelaku, dan sebaran informasi di kalangan pelaku (Coleman, 1990). Meskipun asumsi perilaku biasanya menggambarkan pelaku sebagai orang yang rasional dan oportunistik, asumsi kedua menyatakan bahwa seringkali terdapat konflik kepentingan antara kedua aktor tersebut. Kesalahan dapat terjadi jika relevan. Asumsi ketiga adalah bahwa informasi didistribusikan secara asimetris dan biasanya menguntungkan agen. Hal ini menyebabkan dua masalah besar bagi para pemimpin sekolah. Ada dua jenis perilaku oportunistik yang dikenal sebagai *adverse selection* (atau *ex ante opportunism*, atau informasi tersembunyi) dan moral hazard (atau *ex post opportunism*, atau tindakan tersembunyi).

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik merupakan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan (Nugroho et al., 2011). Implementasi merupakan suatu tahapan dalam keseluruhan proses kebijakan publik mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dan implementasi bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat (Yusri, 2019). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah: (1) Faktor komunikasi; (2) Faktor sumber daya (*resources*); (3) Penerapan unsur sikap (*disposisi*); (4) Faktor struktural birokrasi.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*).

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menyebutkan suatu syarat dimana seorang taat terhadap perintah atau anggaran yang diberikan. Seperti yang dikemukakan Tyler (Saleh & Susilowati, 2004) masih ada 2 perspektif dasar kepatuhan dalam aturan, yaitu fragmental & normatif. Perspektif fragmental berarti individu menggunakan kepentingan langsung & tanggapan terhadap perubahan yg herbi perilaku. Perspektif normatif herbi moral & antagonis menggunakan kepentingan langsung. Seseorang lebih cenderung patuh dalam aturan yg dipercaya sinkron & konsisten menggunakan kebiasaan-kebiasaan mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh dalam aturan lantaran aturan dipercaya suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh dalam peraturan.

Pelaporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Menurut (Mardiasmoro, 2002). Laporan keuangan berisi informasi yang digunakan untuk tujuan berikut: (1) Bandingkan kinerja keuangan aktual dengan kinerja yang dianggarkan; (2) Evaluasi kondisi keuangan dan hasil operasi; (3) membantu dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap undang-undang keuangan dan peraturan lainnya; (4) Membantu menilai tingkat efisiensi dan efektivitas. Ciri-ciri kualitatif laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Gabungan laporan keuangan yang mencerminkan pelaporan keuangan pemerintah kota sebagai satuan pelaporan adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL/SAK, neraca, laporan operasional, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengelolaan BOS Reguler sebagaimana dijabarkan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler memakai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu wewenang sekolah buat melakukan perencanaan, pengelolaan, & supervisi acara sinkron menggunakan syarat & kebutuhan Sekolah. Menurut (Marjuki, 2015) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan contoh manajemen yang menaruh swatantra yg lebih & fleksibilitas yg lebih luas pada sekolah pada mengelola asal daya mereka & menaikkan partisipasi eksklusif rakyat pada rangka menaikkan kualitas sekolah sinkron kebijakan & perundang-undangan pendidikan yg ketika ini berlaku. Suatu Manajemen Berbasis Sekolah yang efektif dari atas praktik keterbukaan, akuntabilitas, transparansi & keberlanjutan, dan penempatan kontrol buat kemajuan seluruh aspek sekolah tadi secara tegas pada tangan seluruh pemangku kepentingan pada sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah menyediakan semacam kerangka kerja buat berlangsungnya proses pertumbuhan sekolah menggunakan sistem terbuka, transparan & akuntabel sebagai akibatnya memungkinkan sekolah buat berkiprah maju. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler mengatur bahwa Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam Pemda (Riswat, 2021) (1) Tim BOS Provinsi; atau (2) Tim BOS Kabupaten/Kota. Tim BOS Kabupaten/Kota ditetapkan Bupati/Walikota. Tim BOS Sekolah ditetapkan sang Kepala Sekolah. Dana BOS Reguler yg diterima sang sekolah dipakai buat membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menjadi berikut: (1) Penerimaan siswa baru; (2) Pengembangan perpustakaan; (3) Kegiatan pembelajaran & ekstrakurikuler; (4) Kegiatan asesmen/penilaian pembelajaran; (5) Administrasi aktivitas sekolah; (6) Pengembangan profesi pengajar & energi kependidikan; (7) Langganan daya dan jasa; (8) Pemeliharaan wahana & prasarana sekolah; (9) Penyediaan indera multimedia pembelajaran; & (10) Pembayaran honor. Tim BOS Sekolah wajib menyusun laporan secara lengkap, & sekolah yg diselenggarakan sang Pemda membicarakan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler pada Pemda. Di taraf kabupaten/kota,

pelaporan dana BOS mencakup rekapitulasi realisasi penggunaan BOS Reguler & laporan output belanja BOS Reguler sekolah yang diselenggarakan pemerintah sentra atau pemerintah daerah.

Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS)

Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) menjadi salah satu tantangan penyelesaian permasalahan manajemen sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Pengajuan rencana kerja anggaran sekolah merupakan suatu hal yang mendesak dan rutin dilakukan pada lembaga-lembaga yang mendapat alokasi anggaran dari pemerintah (Bambang & Entri, 2017), Alokasi anggaran dirancang untuk mendukung biaya operasional lembaga dan kegiatan pengembangan. Di sisi lain, dalam situs resmi (Rkas.Kemdikbud.Go.Id, 2007) disebutkan bahwa Formulir Permohonan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (selanjutnya disingkat ARKAS) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyusun, melaksanakan, dan melaksanakan anggaran tersebut digambarkan sebagai sistem informasi yang memfasilitasi Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana.

Berbagai penelitian terdahulu juga dijadikan peneliti dalam acuan penelitian. Penelitian (Yulyanti *et al.*, 2022) mempunyai implikasi signifikan terhadap transparansi penggunaan dana BOS di sekolah dasar negeri di kabupaten Mangalabomban. Semakin baik penggunaan aplikasi (ARKAS), penggunaan dana BOS akan semakin transparan. Dadang Suhendar (2020) menemukan dalam penelitiannya bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMK yang disurvei cenderung baik dan sejalan dengan petunjuk teknis BOS. Meskipun sampelnya mempunyai karakteristik yang berbeda, namun hambatan dalam mengelola dana BOS relatif sama. Hambatan utama dalam pengelolaan dana BOS adalah terkait dengan keterlambatan pencairan, kelengkapan dokumentasi akuntansi, dan penetapan prioritas penggunaan anggaran yang relatif tidak direncanakan dengan baik.

Penelitian (Kia, 2020) kepala sekolah mengamati langsung pekerjaan bendahara dalam pengelolaan keuangan sekolah, tidak ditemukan adanya kecurangan, serta tidak lengkapnya kuitansi dan catatan lainnya yang disebabkan oleh kecacauan dan keuntungan yang dicapai sehubungan dengan mereka. Pelaksanaan Siklus II adalah tentang review. Personil keuangan mengelola pelaporan keuangan dengan tepat. Oleh karena itu, penelitian tidak dilanjutkan pada Siklus III. Dalam melaksanakan kajian untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah, maka pengelolaan keuangan sekolah memerlukan akuntan yang jujur, bertanggung jawab, dan mengetahui penggunaan dana sesuai kebutuhan.

Penelitian (Zulaika *et al.*, 2022) menyebutkan kurangnya ketersediaan jaringan internet di beberapa sekolah di Kabupaten Bintan Timur dan keterbatasan operator aplikasi yang tetap menjadi bendahara menjadi kendala dalam pengelolaan dana BOS bahwa hal itu telah menjadi. Oleh karena itu, tersedianya dokumentasi pengelolaan dana BOS yang lengkap hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SIPBOS tidak akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bintan. Penggunaan aplikasi SIPBOS dalam pengelolaan dana BOS harus memperhatikan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai sehingga memungkinkan penggunaan aplikasi ini dalam pengelolaan dana BOS, baik dari segi ketersediaan dokumen tata kelola maupun ketersediaan dokumen tata kelola. Kita dapat menyimpulkan bahwa hal itu harus didukung. Ketepatan waktu lebih efektif berfungsinya manajemen sekolah dan teknologi informasi secara umum baik dan, baik secara parsial maupun simultan, mempunyai dampak yang signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan dana BOS. Temuan penelitian ini akan membantu Dinas Pendidikan Kota Tangsel memperkuat kapasitas bendahara sekolah, meningkatkan partisipasi mereka dalam tata kelola sekolah dan masyarakat, serta mendukung teknologi informasi untuk memastikan transparansi dan pengelolaan dana BOS yang bertanggung jawab dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggunaan (Hakim & Suhendar, 2020).

Penelitian (Rahayu *et al.*, 2020) menyatakan bahwa kepala sekolah mempunyai tugas untuk mengaudit laporan keuangan, yang mencerminkan peran kepemimpinan kepala sekolah. Pada kenyataannya, peran supervisor mirip dengan peran auditor. Hal ini mencakup analisis, saran,

evaluasi, informasi mengenai tindakan yang divalidasi, dan rekomendasi atas efektivitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Ruang lingkup audit internal mencakup pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja tanggung jawab yang diberikan.

Penelitian (Engko *et al.*, 2021) menyatakan bahwa pernyataan pelapor bukan merupakan penipuan, namun muncul beberapa permasalahan setelah audit, antara lain pemalsuan laporan keuangan dan penggelapan dana perusahaan. Oleh karena itu peran audit internal sangatlah penting. Audit internal perlu memantau aktivitas perusahaan secara lebih menyeluruh untuk mencegah risiko kecurangan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kabupaten dengan Subjek Penelitian adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta sebagai penerima bantuan dana BOS Reguler. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pengelola dana BOS di SMK (Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator ARKAS). Objek penelitian yaitu SMK Swasta di Kecamatan Sragen yaitu SMK Muhammadiyah 4 Sragen. Peneliti juga mengobservasi mengenai ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), cara kerja ARKAS dan ketersediaan dokumen pengelolaan dana BOS hasil dari ARKAS pada objek penelitian, serta dokumentasi resmi mengenai pengelolaan dana BOS dari hasil output ARKAS di SMK Muhammadiyah 4 Sragen.

Teknik pengolahan data yang peneliti lakukan terdiri dari reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Analisa data pada penelitian ini dilakukan peneliti setelah mendapatkan data hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara Dana BOS dan operator ARKAS pada sekolah-sekolah SMK SWASTA yang menjadi informan dalam penelitian ini. Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi dalam menganalisa data yang telah diperoleh dengan cara membandingkan hasil pengamatan pada saat berada di objek penelitian dengan data hasil wawancara terkait penggunaan ARKAS dalam pengelolaan laporan keuangan BOS; membandingkan hasil wawancara antara Kepala Sekolah, Bendahara Dana BOS dan Operator ARKAS secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi atau terpisah; dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait dengan hasil akhir pengelolaan dana BOS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan teknik reduksi data terkait wawancara terhadap pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Subjek yang diwawancarai adalah Kepala Sekolah, Bendahara, dan Operator Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dijabarkan sebagai berikut. Proses reduksi ini dilakukan peneliti melalui tahap awal pengumpulan data yang digunakan untuk meringkas, mengklasifikasikan, dan memfokuskan data penelitian agar mudah untuk dianalisis.

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang meliputi :

- Efektivitas kemampuan manajerial dan peran Kepala Sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS
- Pandangan pihak sekolah terkait pentingnya audit internal dalam pelaporan dana BOS
- Tanggungjawab Bendahara dan Operator ARKAS dalam mengelola serta melaporkan penggunaan dana BOS
- Peran ARKAS dalam keterbukaan atau transparansi serta efisiensi pelaporan dana BOS
- Persepsi terkait potensi yang ditimbulkan akibat dari resiko *fraud* atau kecurangan di lingkungan sekolah dan bagaimana upaya pencegahan yang efektif
- Peran audit internal dalam pencegahan *fraud* pelaporan dana BOS melalui ARKAS

Berdasarkan hasil wawancara, diuraikan menjadi beberapa tema utama yang berguna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Efektivitas manajerial Kepala Sekolah

Efektivitas Manajerial Kepala Sekolah meliputi kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Sebagai pemimpin utama, kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam berbagai aspek operasional sekolah, termasuk pengelolaan dana BOS. Penilaian kemampuan manajerial Kepala Sekolah secara umum efektif dalam mengelola dana BOS serta meminimalkan risiko kecurangan. Beberapa Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Sragen menyebutkan bahwa melalui kemampuan manajerial yang cukup kuat dan dukungan dari pihak sekolah, mereka dapat merencanakan dan mengawasi penggunaan dana BOS secara lebih terstruktur dan juga akuntabel. Kepala sekolah yang memahami dasar-dasar manajemen keuangan dan pengawasan internal hasilnya cenderung signifikan memiliki laporan yang lebih transparan dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Dana BOS

Otonomi dan Tingkat fleksibilitas Kepala Sekolah dalam Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Dana BOS wajib diimbangi dengan transparansi pelaporannya serta akuntabilitas pengelolaannya. Otonomi yang dimaksudkan dalam hal ini ialah peran kepala sekolah serta pihak lain (bendahara dan operator ARKAS) dalam memaksimalkan penginputan data yang tepat serta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Bendahara dan operator menjelaskan bahwa mereka bertanggung jawab dalam memasukkan data keuangan BOS secara teliti melalui ARKAS guna membantu pihak sekolah dalam mendokumentasikan penggunaan dana secara lebih terstruktur. ARKAS juga dianggap lebih memudahkan dan sangat membantu dalam proses pelaporan dana BOS. Namun, dengan adanya ARKAS masih menjadi tantangan, seperti yang disebutkan pihak Kepala Sekolah, bahwa untuk lebih memahami aplikasi secara teknis sering kali masih dibutuhkan pelatihan lebih lanjut bagi bendahara maupun operator. Hal ini dikarenakan Bendahara dan Operator menjadi peran utama aplikasi ARKAS dimana perlu dimaksimalkan kinerjanya agar tidak terjadi kesalahan penginputan data keuangan dana BOS.

Pelaksanaan Audit Internal di SMK

Pelaksanaan audit internal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimaksudkan untuk mencegah potensi kecurangan dan pencegahan terhadap dana BOS. Hal ini juga merupakan langkah penting bagi SMK untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pengelolaan sekolah melalui dana BOS. Audit internal bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik operasional sekolah dengan standar yang telah ditetapkan, baik dalam aspek keuangan, akademik, maupun manajemen umum. Ruang lingkup audit internal difokuskan mencakup area keuangan dan administrasi terhadap pengelolaan dana BOS. Pelaksanaan audit internal di SMK terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya :

- a. Perencanaan audit, dengan membentuk tim audit internal yang terdiri dari guru senior, staf administrasi, atau pihak yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Untuk selanjutnya dilakukan penyusunan strategi audit.
- b. Pelaksanaan audit, yang dilakukan dengan pengumpulan dan pemeriksaan data, observasi, serta wawancara atau diskusi untuk mendapatkan informasi tambahan.
- c. Analisis temuan, yaitu membandingkan hasil audit dengan standar yang sudah ditentukan untuk tindakan koreksi atau perbaikan dari pihak sekolah.
- d. Pelaporan hasil audit, mencakup pelaporan terkait temuan, hasil koreksi, serta tindak lanjut yang kemudian diserahkan kepada kepala sekolah dan pihak terkait.
- e. Tindak lanjut, terkait monitoring terhadap implementasi perbaikan dan tindakan korektif yang sudah dilakukan serta rekomendasi audit.

Dari hasil wawancara, terdapat beberapa kepala sekolah yang menekankan bahwa audit internal sangat membantu dalam menemukan kesalahan kecil sebelum menjadi masalah besar. Sehingga,

kegiatan audit internal yang dilakukan secara berkala di SMK dapat membantu meningkatkan akurasi laporan keuangan dan meminimalkan potensi kecurangan pelaporan dana BOS.

Peran Audit Internal Dalam Mencegah *Fraud* Dana BOS

Peran Audit Internal dalam Mencegah *Fraud* Dana BOS sangat krusial untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu sumber utama pendanaan pendidikan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam hal ini, semua responden penelitian setuju bahwa adanya sistem pengawasan yang baik melalui peran audit internal mampu mengurangi potensi kecurangan, terutama jika audit dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Bendahara BOS juga menuturkan bahwa adanya audit, mereka menjadi lebih teliti dalam bekerja serta tingkat kecurangan mampu dicegah sejak awal. Peran audit internal yang efektif dan ketat, mampu mencegah *fraud* ketika saat pelaksanaan pelaporan dana BOS yang dipadukan dengan ARKAS sebagai pendukung tingkat transparansi.

Adanya audit internal mampu mendeteksi secara dini tingkat *fraud* di SMK. Keberhasilan Audit Internal dalam Mencegah *Fraud* Dana BOS bisa diketahui dalam beberapa indikator berikut :

- Tidak ditemukan tingkat penyimpangan yang signifikan dalam laporan keuangan Dana BOS.
- Transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS kepada masyarakat.
- Peningkatan kepercayaan dari masyarakat, komite sekolah, dan pemangku kepentingan.
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana BOS untuk mendukung mutu pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diantaranya: (1) Secara signifikan Kepala Sekolah memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 4 Sragen yang akuntabel dan efisien dengan melibatkan beberapa pihak yaitu bendahara BOS dan Operator ARKAS; (2) Kepala Sekolah secara berkala mempersiapkan SDM yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan guna menyiapkan pelaporan dana BOS yang akuntabel. Peningkatan kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS melalui SDM yang berkualitas di bidangnya adalah upaya yang perlu ditempuh dengan adanya dukungan pelatihan dan teknologi yang canggih. Dengan pengelolaan yang baik, dana ini dapat memberikan dampak signifikan pada kualitas pendidikan di Indonesia; (3) Melalui Teknik triangulasi, peneliti menyimpulkan bahwa dari beberapa SMK yang terdapat di Kabupaten Sragen ketika penyusunan rencana anggaran sekolah yang berhubungan dengan dana BOS lebih banyak melibatkan pihak yayasan, kepala sekolah, komite, dan orang tua wali, dengan harapan bahwa rencana anggaran yang disusun akan transparan; (4) Peran bendahara dan operator ARKAS penting dalam memastikan ketepatan data dan kelancaran proses pelaporan keuangan. Melalui ARKAS pula memudahkan sekolah dalam melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan petunjuk teknis. Dimana ARKAS juga telah mendapatkan persetujuan dari pusat setiap tahunnya karena penggunaan sudah sesuai dengan juknis masing-masing sekolah; (5) Audit internal memiliki peran yang strategis dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) Dana BOS dengan cara mengidentifikasi risiko yang akan terjadi kedepannya, memantau tingkat kepatuhan sekolah, memberikan saran atau rekomendasi terkait perbaikan atas temuan-temuan risiko yang terjadi, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana BOS

Saran dari penelitian ini diantaranya : (1) Peningkatan efektivitas kinerja manajerial Kepala Sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan Dana BOS perlu didukung dengan adanya sumber daya, pelatihan-pelatihan, serta teknologi yang berkualitas sebagai upaya untuk meningkatkan pula mutu dan kualitas Pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); (2) Perlu dilakukan strategi optimalisasi juga terkait sistem audit internal dan perannya dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dana BOS. Optimalisasi dapat dilakukan dengan cara sinkronisasi pelaksanaan audit yang efektif dengan dukungan kompetensi/keahlian auditor, teknologi, serta budaya kerja

sekolah yang transparan; (3) Setelah hasil audit internal selesai, Kepala Sekolah diharapkan melakukan monev dengan pihak internal sekolah secara berkala terhadap hasil audit tersebut. Hal ini berguna untuk mencegah risiko dan kecurangan yang terjadi kedepannya. Kepala Sekolah juga dapat mempertanggungjawabkan hasil tersebut melalui transparansi informasi terhadap pihak eksternal khususnya akurasi laporan keuangan dana BOS yang pengelolaan dan pelaporannya dilakukan melalui sistem ARKAS; (4) Ketiga saran di awal akan lebih efektif serta efisien pelaksanaannya ketika mendapat dukungan dari pihak internal dan eksternal dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS di SMK Muhammadiyah 4 Sragen melalui ARKAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, I., & Entri, S. (2017). Pengembangan Model Pengelolaan Anggaran Sekolah Berbasis Partisipasi. *Jurnal Widya Sari*, 6(2), 50–75.
- Coleman, J. (1990). *No Title Foundations of Social Theory*. Harvard University Press.
- Engko, C., Ahuluheluw, N., & Selong, R. R. (2021). Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud Dengan Menggunakan Fraud Diamond Model. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(2), 45–59. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol2iss2pp45-59>
- Hakim, D. R., & Suhendar, D. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Komparatif pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 17(01), 11–23. <https://doi.org/10.25134/equi.v17i1.2598>
- Hidayat, D., & Noviarti, W. (2005). *Kejuruan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Smk Negeri Se-Kota Tangerang Selatan*. 4(2013), 80–99.
- Kia, P. (2020). Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah dalam Mengelola Keuangan Sekolah di SD I Baopukang Kecamatan Nagawutung. *E-Jurnal Mitra Pendidikan*, 4(7), 447–460.
- Mardiasoro. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Marjuki. (2015). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah*. Bahan Bacaan.
- Nugroho, R. ., Nina, W., & Rihandoyo. (2011). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011). *Journal of Public Policy and Management Review*, 53(9), 167–169.
- Nurtanio, A. P. (2009). *Strategi Mengembangkan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah*. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132296019/penelitian/Strategi+Mengembangkan+Kompetensi+Manajerial+Kepala+Sekolah.pdf>.
- Rahayu, K. P., Wati, R., Prihanto, Y., Wartono, T., & Nuryani, Y. (2020). Pelatihan Audit Internal Penggunaan Dana Bos Untuk Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi SMP Kota Tangerang Selatan Gugus 03. *Dedikasi Pkm*, 1(2), 6. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i2.6382>
- Riswat, R. (2021). Inefisiensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Unit-Unit Kerja di IAIN Curup. *Jurnal Perspektif*, 14(1), 111–137. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v14i1.39rkas.kemdikbud.go.id>. (2007).
- Saleh, R., & Susilowati, I. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis Strategi*, 13(7).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. CV.
- Yulyanti, Rakib, M., & Rahman, N. (2022). (Pendidikan dan Pengajaran) The Effect Of School Budget Work Plan Application On The Accountability. *Jurnal PAJAR*, 6, 251–259. Volume 6 Nomor 1 Januari 2022 | ISSN Cetak : 2580 - 8435 | ISSN Online : 2614 - 1337.
- Yusri. (2019). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma (JP)*, 8(2), 105–113. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/3010>
- Zulaika, N., Nasution, U. O., Dewi, I. R. K., Alamsyahbana, M. I., & Utami, R. (2022). Analisis Penggunaan Aplikasi SIPBOS Dalam Pengelolaan Dana BOS Di Kecamatan Bintang Timur. *JIP: Jurnal Informasi Penelitian*, 2(12), 4203–4210. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1523>